

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra BPMPT Tahun 2015-2018. LKIP Tahun 2016 disusun berdasarkan Renja Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2015-2018).

LKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja BPMPT. Komitmen dalam penyusunan LKIP BPMPT, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPMPT untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja BPMPT pada tahun 2016. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama BPMPT pada tahun 2016, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 pada BPMPT Provisnis Jawa Barat telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKIP BPMPT Tahun 2016 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Januari 2017  
Kepala  
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu  
Provinsi Jawa Barat,

**Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601217 198511 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPMPT Provisis Jawa Barat.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BPMPT yang telah dicanangkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama BPMPT Tahun 2016, menunjukan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya 91% yaitu pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah nilai investasi di Jawa Barat dimana pencapaiannya mencapai 117,4 % serta pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pencapaian sebesar 96,7 %.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPMPT ke depan

*Pertama*, walaupun satu IKU BPMPT telah mencapai target yang sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat, namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Jawa Barat bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Jawa Barat.

*Kedua*, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Jawa Barat akan meningkat.

*Ketiga*, perlu segera dibangun gedung baru BPMPT Provinsi Jawa Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan BPMPT kepada pemohon izin walaupun sudah dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.

*Keempat*, masih lemahnya koordinasi BPMPT dengan Kabupaten/Kota dan OPD/Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara BPMPT Provinsi Jawa Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.